SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Banda Aceh, Jumat (30 April 2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Pidie, **Mahfuddin Ismail, S.PDi, M.AP** dan Bupati Pidie, **Roni Ahmad, S.E.** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Kekurangan volume atas tiga belas paket pekerjaan belanja modal pada empat SKPK; (2) Pembayaran atas perjalanan dinas tidak didukung bukti senyatanya; dan (3) Tunjangan khusus untuk bupati dan wakil bupati tidak sesuai ketentuan.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Pidie untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Memerintahkan kuasa pengguna anggaran, PPK, PPTK dan pengawas lapangan terkait cermat dalam melakukan pengendalian dan/atau pengawasan pekerjaan; (2) Para pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan atau menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas ke kas daerah; dan (3) Tidak menganggarkan lagi tunjangan khusus untuk Bupati dan Wakil karena tidak sesuai ketentuan.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Pidie atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Pidie untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan